

Pendidikan Politik Masa Orde Baru: Menjaga Stabilitas dan Ideologi dalam Pembangunan Nasional

Faujian Lhaystari Dea¹, Reno Fernandes^{2*}, Suryanef Suryanef³

Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: renofernandes@fis.unp.ac.id

Abstrak

Pendidikan politik pada masa Orde Baru (1966–1998) digunakan sebagai alat untuk membentuk kesadaran politik warga negara yang loyal terhadap negara dan ideologi Pancasila. Penelitian ini bertujuan mengkaji kebijakan pendidikan politik masa Orde Baru serta dampaknya terhadap perkembangan demokrasi pasca reformasi. Menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi literatur, artikel ini menyoroti kebijakan seperti Penataran P-4, kurikulum berbasis Pancasila, dan pembatasan kebebasan akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan politik pada masa itu berhasil menciptakan stabilitas, tetapi membatasi ruang berpikir kritis dan partisipasi politik. Di masa kini, tantangan seperti rendahnya literasi politik dan apatisisme masih muncul. Namun, reformasi pendidikan politik yang lebih terbuka dan berbasis konteks lokal menjadi prospek positif bagi penguatan masyarakat sipil dan demokrasi. Pendidikan politik yang partisipatif penting untuk membentuk warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Memberikan kontribusi dengan menunjukkan bagaimana kebijakan pendidikan politik Orde Baru memengaruhi arah perkembangan demokrasi pascareformasi.

Kata Kunci: Orde Baru; Pembangunan Nasional; Pendidikan Politik, Stabilitas Politik.

Abstract

Political education during the New Order (1966–1998) was used as a tool to shape the political awareness of citizens who were loyal to the state and the Pancasila ideology. This study aims to examine the political education policies during the New Order and their impact on the development of democracy after the reformation. Using qualitative descriptive methods through literature studies, this article highlights policies such as Penataran P-4, Pancasila-based curriculum, and restrictions on academic freedom. The results of the study show that political education at that time succeeded in creating stability, but limited the space for critical thinking and political participation. In the present, challenges such as low political literacy and apathy still arise. However, political education reforms that are more open and based on local contexts are positive prospects for strengthening civil society and democracy. Participatory political education is important for forming active and responsible citizens. Contributing by showing how the New Order's political education policies influenced the direction of the development of democracy after the reformation.

Keywords: National Development; New Order ; Political Education; Political Stability,

How to Cite: Dea, F. L., Fernandes, R. & Suryanef, S. (2025). Pendidikan Politik Masa Orde Baru: Menjaga Stabilitas dan Ideologi dalam Pembangunan Nasional. *Jurnal Kajian Sosial Humaniora*, 2(1), 16-23.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author.

Pendahuluan

Lahirnya rezim Orde Baru ditandai dengan semangat penataan kembali kehidupan politik nasional pasca peristiwa G30S/PKI yang dianggap sebagai ancaman terhadap eksistensi negara dan ideologi Pancasila. Pemerintah Orde Baru menilai bahwa stabilitas politik merupakan prasyarat mutlak bagi pembangunan nasional, sehingga pendidikan politik dijadikan sarana strategis untuk membentuk sikap dan perilaku politik masyarakat yang sesuai dengan garis kebijakan negara. Melalui program-program seperti Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), pemerintah berupaya menanamkan nilai-nilai Pancasila secara sistematis kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparatur negara, pelajar, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan. Pendidikan politik pada masa ini lebih menekankan aspek indoktrinasi dan pengendalian, dengan tujuan menciptakan warga negara yang setia kepada pemerintah, tidak kritis terhadap kebijakan negara, serta menjauhkan masyarakat dari pengaruh ideologi lain yang dianggap bertentangan dengan Pancasila (Judijanto et al., 2025).

Pendidikan politik yang baru dimulai pada masa Orde Baru mengambil langkah dan tindakan yang sifatnya reaktif dan korektif terhadap segala bentuk kesalahan dan penyimpangan yang telah dilakukan pada masa lalu. Usaha penataan Kembali dalam keseluruhan aspek kehidupan, baik yang menyangkut penyelenggaraan negara, kebudayaan dan struktur maupun menyangkut sistem dan proses di bidang politik, telah dilakukan dan diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 (Andrew, 2016).

Peran dan inti dari pendidikan politik adalah pemahaman politik atau pemahanan aspek-aspek politis dari setiap permasalahan. Pemahaman politik berarti pemahaman konflik. Banyaknya konflik dalam masyarakat disebabkan oleh adanya kontroversi, perbedaan pikiran, sikap, tindakan, dan kepentingan dalam masyarakat.

Pendidikan politik dilaksanakan agar membentuk membuat rakyat menjadi melek politik, sehingga mereka menjadi sadar politik, lebih kreatif dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pembangunan dalam bentuknya yang positif. Dengan pendidikan politik ini, diharapkan tercipta pribadi politik yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Namun dalam praktiknya, pendekatan top-down yang dilakukan oleh Orde Baru menjadikan pendidikan politik bersifat indoktrinatif. Konsep pendidikan kritis ala Paulo Freire, yang menekankan pada dialog dan kesadaran transformatif, tidak mendapat tempat dalam sistem pendidikan politik masa itu.

Pendidikan politik yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru pada hakikatnya untuk membentuk manusia Pancasila yang mempunyai sifat religius, utuh dalam kehidupan dunianya dan memiliki persiapan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat, dan senantiasa berada dalam keluwesan, keselarasan dan keseimbangan. Dengan demikian, lengkaplah manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila, yang benar-benar melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 (Nasution, 2014).

Generasi muda sebagai sasaran pendidikan politik dituntut berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Untuk itu, generasi muda harus memiliki pengetahuan dan keterampilan politik yang memadai, agar dengan kemampuan yang dimilikinya tersebut ia dapat berpolitik secara bertanggung jawab (Nurdiansyah, 2015).

Dengan pendidikan politik demikian, bangsa Indonesia disadarkan bahwa cita-cita masyarakat adil dan makmur hanya dapat dicapai oleh seluruh komponen bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila. Pembangunan nasional yang dirancang secara baik oleh pemerintah Orde Baru (melalui Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, dan Pendek) diharapkan dapat membimbing bangsa Indonesia menuju cita-citanya. Keberhasilan tersebut sangat bergantung pada manusia Indonesia sebagai titik pusat pelestarian Pancasila dan UUD 1945 serta semangat para penyelenggara negara dalam mengimplementasikan konsepsi strateginya guna mencapai tujuan bersama (Ramadhan & Sirozi, 2024).

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengarahkan fokusnya pada kajian mengenai peran pendidikan politik dalam membentuk karakter politik warga negara pada masa Orde Baru, serta bagaimana dampak dari pendidikan politik tersebut mempengaruhi dinamika dan perkembangan demokrasi Indonesia setelah era reformasi.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman akademik mengenai peran pendidikan politik pada masa Orde Baru dalam membentuk karakter politik warga negara, serta memberikan gambaran mengenai implikasinya terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia pada era pasca reformasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian kualitatif deskriptif bertujuan mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai suatu fenomena sosial atau alam secara detail dan mendalam, dengan fokus pada makna dan interpretasi (Sugiyono, 2019). Metode studi literatur digunakan karena data yang dikaji berasal dari berbagai

sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, dan arsip sejarah yang berhubungan dengan praktik pendidikan politik pada masa Orde Baru, terutama dalam konteks upaya negara menjaga stabilitas dan penanaman ideologi pembangunan nasional.

Penelitian diawali dengan penelusuran data menggunakan kata kunci pada basis data ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kriteria pemilihan sumber mencakup relevansi topik, kredibilitas penulis, dan keberlanjutan publikasi dalam rentang waktu 1966–2024 untuk mencakup perspektif historis dan kontemporer. Hanya sumber yang memiliki kejelasan metodologis, terbit di jurnal terakreditasi, atau diterbitkan oleh lembaga resmi yang digunakan.

Analisis data dilakukan secara tematik dari kebijakan pendidikan politik dan literatur yang relevan, dengan tujuan untuk menggambarkan penerapan kebijakan tersebut serta pengaruhnya terhadap pembentukan karakter politik masyarakat Indonesia. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber pustaka yang dikaji dari lintas periode dan pendekatan, untuk melihat konsistensi narasi tentang pendidikan politik Orde Baru dalam berbagai publikasi akademik.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Pendidikan di Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, kebijakan pendidikan mengalami perubahan yang signifikan, salah satunya adalah penerapan prinsip desentralisasi pendidikan yang bertujuan untuk memperluas akses dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu langkah konkret dari kebijakan ini adalah alokasi anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari total anggaran negara, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan adanya desentralisasi ini, daerah-daerah diberi kewenangan lebih besar dalam pengelolaan pendidikan, yang diharapkan dapat menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan.

Namun, meskipun kebijakan ini memberikan kesempatan bagi daerah untuk lebih terlibat, tantangan besar tetap ada dalam hal pemerataan kualitas pendidikan antar daerah, mengingat disparitas sumber daya dan infrastruktur yang ada. Pemerintah pusat juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan ini untuk memastikan bahwa alokasi anggaran yang besar tersebut digunakan secara efektif dalam memperbaiki

kualitas pendidikan dan membangun kapasitas lembaga pendidikan di seluruh Indonesia.

Pada masa Orde Baru, pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Salah satu kebijakan yang paling menonjol dalam upaya penguatan ideologi tersebut adalah Penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), yang diperkenalkan pada tahun 1978. Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila secara sistematis kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari aparatur negara, mahasiswa, hingga pelajar. Penataran P-4 dilakukan melalui pelatihan yang mengedepankan pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dengan harapan masyarakat dapat memahami dan menginternalisasi Pancasila sebagai pedoman hidup yang mengatur moral, etika, dan perilaku sosial mereka.

Selain itu, kurikulum berbasis Pancasila juga diterapkan di sekolah-sekolah sebagai bagian integral dari pendidikan nasional, untuk memastikan bahwa setiap generasi baru Indonesia tumbuh dengan kesadaran yang kuat terhadap nilai-nilai Pancasila. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Orde Baru untuk membentuk warga negara yang loyal terhadap negara dan pemerintah, serta menjaga stabilitas politik dengan membangun kesatuan ideologi yang mengarah pada pemahaman yang seragam tentang Pancasila.

Pada masa Orde Baru, lembaga pendidikan berperan penting dalam mendukung tujuan stabilitas politik dan pembangunan nasional, namun peran tersebut sangat dipengaruhi oleh kontrol ketat pemerintah. Lembaga pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi, digunakan sebagai instrumen untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan mendidik generasi muda agar setia kepada negara serta menghindari ideologi yang dianggap bertentangan dengan negara, seperti komunisme dan liberalisme. Keberadaan organisasi mahasiswa juga dikontrol melalui pembentukan organisasi yang bersifat apolitis, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) atau Ikatan Mahasiswa Nasional Demokrat (IMND), yang lebih mengedepankan nasionalisme dan pembangunan daripada kritik terhadap kebijakan pemerintah. Pembatasan terhadap kebebasan akademik ini juga tercermin dalam sensor terhadap karya ilmiah dan pembatasan ruang diskusi yang tidak sejalan dengan ideologi Orde Baru. Dengan demikian, meskipun lembaga pendidikan berperan sebagai pusat pembentukan karakter dan pengetahuan, kebebasan akademik yang terbatas menjadi

hambatan bagi pengembangan pemikiran kritis dan kreatif di kalangan civitas akademika.

Pendidikan Politik sebagai Sarana Kesadaran Demokratis

Pada masa Orde Baru, pendidikan politik digunakan sebagai sarana untuk membentuk kesadaran politik warga negara agar selaras dengan tujuan negara. Pendidikan politik tidak diarahkan pada peningkatan partisipasi politik yang kritis, melainkan lebih difokuskan pada pembinaan loyalitas terhadap ideologi Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Program-program seperti Penataran P-4 menjadi instrumen utama dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat secara luas, termasuk di lingkungan pendidikan (Prayugo, 2022).

Pendidikan politik turut membentuk masyarakat yang taat dan patuh terhadap negara, namun kurang diberdayakan dalam hal kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Dampaknya, pembangunan masyarakat sipil berlangsung secara terbatas karena kontrol negara yang kuat terhadap ruang politik dan terbatasnya akses warga negara untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi secara substantif.

Tantangan dan Prospek ke Depan

Pendidikan politik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, terutama setelah masa Orde Baru. Politisasi pendidikan menjadi salah satu persoalan utama, di mana institusi pendidikan sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan sebagai ruang netral untuk membangun kesadaran politik yang sehat. Minimnya literasi politik di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, juga menjadi hambatan dalam menciptakan warga negara yang kritis dan partisipatif (Affandi, 2019).

Selain itu, munculnya sikap apatis terhadap politik merupakan dampak dari pengalaman masa lalu yang represif, sehingga banyak warga enggan terlibat dalam proses politik. Meski demikian, terdapat prospek positif ke depan melalui reformasi pendidikan politik yang lebih terbuka dan demokratis. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan politik menjadi indikator bahwa kesadaran politik mulai tumbuh. Penguatan pendidikan politik yang berbasis pada konteks lokal juga menjadi peluang penting untuk membangun pemahaman politik yang relevan dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat setempat. Dengan demikian, pendidikan politik dapat kembali berfungsi sebagai alat pembentukan warga negara yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis.

Kesimpulan

Pendidikan politik pada masa Orde Baru memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran politik warga negara, namun pelaksanaannya lebih menekankan pada loyalitas terhadap negara dan ideologi Pancasila melalui pendekatan yang sentralistik dan terpusat. Pendidikan politik dijadikan instrumen untuk menjaga stabilitas politik dan mendukung agenda pembangunan nasional, tetapi hal ini dilakukan dengan membatasi kebebasan berpikir, partisipasi politik, serta ruang kritik terhadap pemerintah. Akibatnya, meskipun tercipta keteraturan politik, perkembangan demokrasi mengalami stagnasi karena masyarakat tidak diberi ruang untuk tumbuh sebagai aktor politik yang mandiri dan kritis. Oleh karena itu, pendidikan politik ke depan perlu diarahkan pada model yang lebih terbuka, partisipatif, dan kontekstual agar mampu membentuk warga negara yang sadar, aktif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis.

Temuan dalam penelitian ini memberikan implikasi penting bagi perumusan kebijakan pendidikan politik masa kini. Pendidikan politik hendaknya tidak lagi dijadikan sebagai alat untuk menyeragamkan cara pandang warga negara, melainkan diarahkan untuk membentuk kesadaran politik yang reflektif dan partisipatif. Dalam konteks demokrasi yang semakin terbuka, pemerintah dan pemangku kebijakan perlu mendorong pembelajaran politik yang memberi ruang pada perbedaan pendapat, kebebasan berpikir, dan pemahaman terhadap keberagaman pandangan politik. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan perlu diperbarui agar lebih kontekstual, berbasis nilai-nilai demokrasi, serta responsif terhadap perkembangan sosial dan teknologi, khususnya di kalangan generasi muda.

Meski telah mengkaji secara mendalam dinamika pendidikan politik pada masa Orde Baru, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama karena bersifat studi pustaka yang bergantung pada sumber-sumber tertulis. Keterbatasan ini membuat ruang analisis terhadap pengalaman konkret masyarakat menjadi terbatas. Selain itu, kajian tentang pendidikan politik Orde Baru selama ini cenderung menempatkan negara sebagai aktor dominan tanpa mengungkap secara memadai suara masyarakat sipil. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kualitatif lapangan, seperti wawancara mendalam atau studi etnografi, guna mengeksplorasi bagaimana pendidikan politik dipraktikkan dan dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat. Langkah ini penting untuk memperkaya perspektif, memperdalam

pemahaman, dan menghadirkan narasi yang lebih beragam dalam diskursus pendidikan politik di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Affandi, F. N. (2019). Pelaksanaan Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Andrew, H. (2016). *Ideologi Politik Sebuah Pengantar*. Penerbit Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Judijanto, L., Mila, J., Apriyanto, H., Ariesmansyah, A., Arifin, R. K., Vaughan, R., Indrianie, M., Nadila, D., & Aziz, Y. M. A. (2025). *Sistem Politik Indonesia*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Nasution, E. (2014). Problematika pendidikan di Indonesia. *Jurnal Mediasi*, 8(1).
- Nurdiansyah, E. (2015). Implementasi pendidikan politik bagi warga negara dalam rangka mewujudkan demokratisasi di Indonesia. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 2(1), 54–58.
- Prayugo, A. (2022). Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan. *Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3, 3.
- Ramadhan, M. F., & Sirozi, M. (2024). Peran Pendidikan Politik Dalam Pembentukan Karakteristik Masyarakat. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(3), 524–536.
- Sugiyono, S. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta.